

**EFFORTS TO MAINTAIN IRAN NUCLEAR PROGRAM
CENTRAL PRESSURE IN THE UNITED STATES IN THE ERA
PRESIDENT HASSAN ROWHANI 2014**

Subchan Asmarahadi

Department of International Relations, University of Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

The title of this research is "The efforts of Iran to Maintain Nuclear Program In Central Pressure United States in the Era of President Hassan Rowhani 2014". The nuclear program of Iran in the era of President Ahmad Dinejat always rejected negotiations with western countries or tend confrontational, but changes the political dynamics inside Iran with the election of Iranian President Hasan Rowhani as Iran's president opened up opportunities for Western countries, especially the United States to suppress the Iranian president Hasan Rowhani to resolve problems related to Iran's nuclear program. In analyzing the typology used theory Theory of Foreign Policy and Diplomacy. Methods of data collection through library research (library research). The data collected will be processed qualitatively and using deductive method. The success of Iran to maintain its nuclear program is influenced by judging strategy on US foreign policy that is considered likely to be "threatening" and an assessment of the ability of Iran itself does not feel "weaker" or "stronger"; which then resulted in a policy of "defensive". Besides Iran also used the conference diplomacy as a means to prove to the US and around the world that Iran's nuclear program is solely for peaceful purposes. Multilateral diplomacy efforts made in the era of Iranian President Hassan Rohani more moderate. In an effort to maintain its nuclear program amid opposition to the West, Iran through diplomacy or official channels trying to achieve its national interests to comply with international rules official and legitimate. Government and the Iranian people never backward in defending their rights in the civil nuclear field in accordance with international treaties, the Charter of the International Atomic Energy Agency (IAEA), as well as the principle of national sovereignty of Iran itself. Open and official diplomacy conducted by Iran make protective legality of the development of the nuclear program in the country.

Keyword: Nuclear Program, Pressure, Diplomacy

Pendahuluan

Keinginan Republik Islam Iran untuk menunjukkan kepada dunia bahwa program nuklirnya sepenuhnya bertujuan damai adalah dengan menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Di samping itu, Iran juga menandatangani berbagai perjanjian nuklir termasuk Konvensi Larangan Ujicoba Senjata Nuklir (CTBT), Konvensi Larangan Perluasan Senjata Biologi (CWC), dan lain-lain.¹

Tak seperti pada era pra Revolusi Islam, teknologi nuklir Iran pasca Revolusi sudah sepenuhnya mempribumi dan tak lagi bergantung pada luar negeri. Para arsitek Iran sudah mutlak menguasai teknologi ini sehingga mampu mengembangkan dan meningkatkan taraf kecanggihannya. Pasca Revolusi Islam, didukung oleh pengembangan instalasi-instalasi pembangkit nuklir serta pesatnya peningkatan kuantitas, kualitas, dan iptek nuklir Iran, negara ini mulai mengupayakan terobosan untuk memasuki bidang siklus produksi bahan bakar nuklir dan berbagai aspeknya. Pada titik ini, Iran berhasil menguasai semua aspek teknologi nuklir.

Sikap Iran yang non-kompromistis dan tegas dalam pelaksanaan politik luar negerinya terhadap negara-negara yang dikategorikan penindas, hegemonis dan intervensionis, telah membuat AS semakin "gerah". AS terus merongrong dan melakukan berbagai manuver untuk menjatuhkan pemerintahan Mullah Iran dan menyudutkan Iran melalui isu program senjata nuklir yang dikampanyekan AS dan provokatornya, Israel sebagai "dapat mengancam keamanan dan membahayakan perdamaian dunia".²

Tekanan Amerika Serikat (AS) dan sekut-sekutu Eropanya untuk mendesak Iran untuk menghidupkan kembali perundingan terkait program nuklirnya di era Presiden Hasan Rohani. Hal ini lantaran terinspirasi oleh kemenangan Hassan Rohani dalam pemilihan presiden Iran, dan perundingan ini akan menguji posisi pemerintahan baru tersebut, demikian menurut

¹ "Resistensi Nuklir: Sketsa Perjuangan Bangsa Iran Menggapai Kemajuan", diakses pada tanggal 1 Desember 2014, tersedia pada http://www.irib.ir/worldservice/melayuRadio/nuklir/index_nuklir.htm

² *Ibid*

diplomasi AS dan Uni Eropa.³ Sebagaimana diketahui bahwa di era Ahmadinejad dikenal sebagai presiden yang kerap berkonfrontasi dengan negara-negara Barat. Dalam kampanyenya, Rohani berjanji mengakhiri isolasi komunitas internasional atas Iran, dan menghidupkan kembali ekonomi negara tersebut.⁴

Perundingan diplomatik antara Iran dan negara-negara Barat guna menghentikan program pengembangan nuklir Iran mengalami kebuntuan sejak April. Pemerintah AS dan Eropa meyakini bahwa kebijakan nuklir Iran secara menyeluruh masih dikendalikan oleh Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ulama 73 tahun tersebut menolak menyetujui konsesi selama empat tahun jalannya perundingan internasional antara Iran dan lima negara anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) ditambah Jerman.

Tindakan pertama yang dilakukan Presiden Iran Hasan Rohani adalah mencabut segel yang dipasang oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada tahun 2005 di situs-situs reaktor nuklir Iran sebagai hasil negosiasi Iran dan IAEA untuk menghindari konfrontasi dengan negara-negara Arab, Barat-Israel. Hasil negosiasi itu, yang menghindari Iran dari sanksi ekonomi militer Barat-Israel, merupakan buah tangan Rohani. Rohani mengatakan pemerintahannya akan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi "sanksi brutal" yang telah dijatuhkan terhadap Iran. "Bangsa Iran tidak melakukan sesuatu yang salah dan pantas mendapatkan sanksi tersebut. Sanksi itu merupakan alat yang usang dan ekonomi Barat akan merugi sendiri lebih dari gejolak yang dialami Iran. Rohani, mantan negosiator nuklir mengatakan Iran akan mengatur agar sanksi menjadi reda dan menunjukkan "transparansi" guna "membangun kepercayaan" dari dunia. Program Energi Nuklir Iran benar-benar transparan, kami siap untuk

³ Jay Solomon dan Farnaz Fassihi "AS, Eropa Tekan Presiden Baru Iran" dalam <http://indo.wjs.com>, diakses 18 Januari 2015, jam 20.34 WIB.

⁴ "Janji Rohani : Interaksi konstruktif melalui kebijakan moderat" dalam <http://www.mahdi.news.com>, diakses 18 Januari 2015, jam 20.40 WIB.

menunjukkan transparansi dan kami siap membuat seluruh dunia menjadi jelas bahwa tindakan yang diambil oleh Republik Islam Iran benar-benar dalam kerangka kerja internasional.⁵

Rumusan Masalah

Bagaimana upaya Presiden Hasan Rowhani untuk mempertahankan program nuklir Iran di tengah tekanan Amerika Serikat?

Kerangka Dasar Teori

1. Tipologi Politik Luar Negeri

Berbagai proposisi teoretik yang kita kenal dalam ilmu sosial sebenarnya memiliki kadar teoretik yang bervariasi. Dan berdasar kadar teori yang dimuatnya, kita bisa memilah proposisi-proposisi itu ke dalam tiga tingkatan: sistem klasifikasi (tipologi atau taksonomi), kerangka konseptual, dan sistem teoretik (teori). Salah satu tingkatan tersebut, yaitu tipologi atau taksonomi bisa berfungsi penting dalam proses pembentukan teori. Tipologi sebenarnya adalah sistem klasifikasi atau sistem kategori, bukan sistem teoretik. Tipologi terdiri dari sistem kategori yang mengorganisasikan hasil pengamatan sehingga hubungan antar kategori-kategori itu bisa dideskripsikan. Suatu tipologi punya hubungan dekat dengan dunia empirik, dan dalam pengertian ini kategori-kategori dalam tipologi itu mencerminkan realitas yang dideskripsikan.

Tujuan tipologi adalah membuat skema yang tertib untuk mengklasifikasikan dan mendeskripsikan fenomena. Tipologi atau taksonomi umumnya tidak berfungsi eksplanasi. Ini adalah sarana deskripsi. Tipologi hanya mendeskripsikan fenomena empirik dengan mencocokkan fenomena itu dengan kategori-kategori yang ada dalam tipologi itu.

Tipologi strategi politik luar negeri yang dibuat oleh John Lovell ini juga mendorong kita untuk berteori bahwa tipe strategi yang diambil oleh

⁵ Ibid

suatu negara bisa dijelaskan dengan menelaah penilaian para pembuat keputusan tentang strategi lawan dan perkiraan mereka tentang kemampuan sendiri. Terdapat empat dimensi, yang setelah dipertemuliskan menghasilkan empat tipe strategi: konfrontatif, memimpin (*ledaership*), akomodatif, dan konkordan.

Gambar 1. Tipologi Strategi Politik Luar Negeri

STRATEGI LAWAN		PENILAIAN TENTANG		
		Mengancam		
Mendukung	PERKIRAAN	Lebih	Konfrontasi	Memimpin
Kuat	KEMAMPUAN SENDIRI	Lebih	Akomodasi	Konkordans
Lemah				

Sumber: John Lovell, *Foreign Policy in Perspective* (Holt, Rinehart, Winston, 1970), hal. 99.⁶

2. Konsep Diplomasi

Menurut Harold Nicholson, kata diplomasi menunjukkan paling tidak lima hal yang berbeda.⁷ Dari kelima hal tersebut, empat hal yang pertama menyangkut: (1) politik luar negeri, (2) negosiasi, (3) mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut, dan (4) suatu cabang Dinas Luar Negeri. Ia selanjutnya mengatakan bahwa interpretasi kelima merupakan suatu kualitas abstrak pemberian, yang dalam arti baik mencakup keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional; dan dalam arti yang buruk mencakup tindakan taktik yang lebih licik.

⁶ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologim* Yogyakarta: LP3ES, 1990, hal. 190

⁷ Harold Nicholson, "Diplomacy", London: 1942, dalam S.L. Roy, *Diplomasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 3

Ada beberapa tipe diplomasi yang dipraktekkan oleh negara sebagai aktor internasional. Dalam diplomasi terdapat konsep *conference diplomacy* yaitu perundingan diplomatik multilateral dalam skala luas yang dilakukan melalui pertemuan internasional.

Kemudian terdapat konsep *parliamentary diplomacy*, yaitu sebuah bentuk konferensi diplomasi yang menekankan upaya persetujuan melalui asas mayoritas di dalam lembaga internasional. Terminologi ini mengungkapkan proses politik serupa yang berlangsung di Majelis Umum dan badan internasional lainnya serta parlemen nasional. Diplomasi parlemen memberikan perhatian terhadap manuver berbagai kelompok regional serta kelompok yang memiliki kepentingan khusus yang menyerupai sidang legislatif, dan tuntutan terhadap dewan nasional.⁸

Kemudian juga ada konsep *summit diplomacy*, yaitu diplomasi pribadi yang dilakukan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan yang berbeda dengan diplomasi peringkat duta besar atau duta. Diplomasi tingkat tinggi sebagai sebuah mekanisme untuk menjalankan hubungan internasional bersifat sangat dramatis namun tidak menjamin keberhasilan yang lebih baik dibandingkan jenis diplomasi lain. Secara teoritis substansial, apa yang dilakukan oleh Iran adalah pengejaran kepentingan praktis dan menempatkannya sebagai prioritas politik luar negeri utama masing-masing negara. Secara sederhana, kepentingan nasional dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku yang berorientasi suatu negara.

Dalam kasus nuklir Iran, dapat dilihat bahwa Iran menggunakan jalur diplomatik untuk tekanan dari Barat yang menggunakan instrumen IAEA sebagai alat organisasi internasionalnya. Konsep-konsep diplomatik dilakukan oleh pihak Iran dalam upayanya untuk mempertahankan kelangsungan program nuklirnya sebagai bagian dari program nasional yang bertujuan kemanusiaan. Persoalan kontroversi nuklir Iran tersebut muncul karena timbulnya kekhawatiran Barat terhadap kepemilikan nuklir

⁸ *Ibid*, hal. 207

oleh negara-negara yang notabene berseberangan dengannya. Di belahan dunia manapun stabilitas keamanan (*security preservation*) adalah masalah yang paling krusial di dalam kelangsungan eksistensi hegemoni sebuah negara.

Dalam upaya untuk mempertahankan program nuklirnya ditengah penentangan dunia Barat, Iran melalui upaya diplomasi atau jalur resmi berusaha mencapai kepentingan nasionalnya dengan mematuhi peraturan-peraturan internasional yang resmi dan sah. Pemerintah dan rakyat Iran tak pernah mundur dalam mempertahankan haknya di bidang nuklir sipil sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional, Piagam Badan Energi Atom Internasional (IAEA), serta prinsip kedaulatan nasional Iran sendiri. Diplomasi terbuka dan resmi yang dilakukan oleh Iran menjadikan pelindung legalitas pengembangan program nuklir di negaranya.

B. Hipotesa

Dari kerangka pemikiran di atas dapat ditarik kesimpulan sementara: Bahwa Presiden Hasan Rowhani mampu bertahan untuk tidak tunduk terhadap tekanan negara penentang nuklir yaitu melalui *conference diplomacy* yaitu dengan perundingan diplomatik multilateral dalam skala luas yang dilakukan melalui pertemuan internasional dan *summit diplomacy*, yaitu diplomasi pribadi yang dilakukan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan yaitu pembicaraan antara Hasan Rowhani dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama

BENTUK STRATEGI IRAN UNTUK MEMPERTAHANKAN PROGRAM NUKLIR MELALUI DIPLOMASI DI ERA PRESIDEN HASAN ROHANI

Dalam upayanya untuk mempertahankan aktivitas pengayaan uraniumnya, Iran di bawah presiden Hasan Rouhani melakukan kebijakan luar negeri yang “defensif” didasarkan pada perkiraan “kekuatan” yang dimiliki Iran serta penilaian “ancaman” dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dalam upaya diplomatik, Iran melakukan upaya “*conference diplomacy*” dengan mengadakan negosiasi perundingan-perundingan guna mendapatkan legitimasi regulatif akan aktivitas pengembangan nuklirnya yang diklaim bertujuan damai.

1. Penilaian Atas Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Dalam sikapnya untuk mempertahankan program nuklirnya, Iran memiliki penilaian atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap upaya Iran untuk melakukan pengayaan uranium. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang terus menerus menekan Iran dianggap cenderung “mengancam”.

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang “mengancam” tersebut tampak pada pernyataan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang meminta Iran membekukan program nuklirnya minimal selama 10 tahun jika ingin mencapai kesepakatan dengan Washington. Batas waktu tersebut dibutuhkan Washington untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan Iran tidak membuat senjata nuklir. Tidak ada langkah lain yang bisa kami lakukan untuk memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Obama berpendapat, jika Iran setuju dengan tawaran itu, internasional akan lebih mudah untuk mengontrol program nuklir mereka. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan menggelar aksi militer ataupun

penjatuhan sanksi. Tapi, bagaimanapun ia mengakui, masalah ini masih menjadi batu sandungan untuk tercapainya kesepakatan akhir.⁹

2. Perkiraan Kekuatan Yang Dimiliki

Kebijakan Iran untuk mempertahankan program nuklirnya juga didasarkan pada perkiraan atas kemampuan Iran sendiri yang tidak merasa “lebih kuat”; yang menjadikannya “konfrontatif” dan juga tidak merasa “lebih lemah”; yang menjadikannya “akomodatif”.

Walaupun kekuatan militer Iran tidak sebanding dengan AS namun Iran memiliki “kekuatan” yang bersifat “legal” yaitu dasar hukum perjanjian dengan IAEA dan traktat NPT. Sesuai pasal keempat Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Iran berhak mendayagunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Lebih dari itu, negara-negara yang memiliki teknologi nuklir bahkan berkewajiban membantu negara-negara yang belum memiliki teknologi tersebut. Iran kemudian juga membayar iuran tahunan keanggotaan kepada IAEA dan oleh karenanya Teheran berhak memiliki dan mengembangkan teknologi nuklir sipil.¹⁰

3. Kebijakan “Defensif”

Dari penjelasan tersebut, didapatkan bahwa upaya Iran untuk mempertahankan program nuklirnya adalah dengan menerapkan strategi politik luar negeri yang “bertahan” dari tekanan Amerika Serikat agar menghentikan program nuklirnya. Alternatif strategi yang “akomodatif” jelas hanya menuruti kemauan Amerika Serikat dan mengakui bahwa kemampuan Iran “lebih lemah” dari Amerika Serikat; dan hasilnya program pengayaan uranium di Iran akan berakhir. Alternatif strategi politik luar negeri yang “konfrontatif” juga akan menunjukkan

⁹ “Obama Ingin Setop Nuklir Iran 10 Tahun” dalam <http://www.republika.com>, diakses 26 Februari 2015, jam 20.30 WIB.

¹⁰ “Resistensi Nuklir: Sketsa Perjuangan Bangsa Iran Menggapai Kemajuan”, diakses pada tanggal 16 Februari 2015, tersedia pada http://www.irib.ir/worldservice/melayuRadio/nuklir/index_nuklir.htm

permusuhan terbuka yang akan membangkitkan amarah aliansi negara-negara Barat yang justru akan merugikan Iran.

Sikap Iran yang cenderung “bertahan” tersebut merupakan hasil penilaian atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dianggap cenderung “mengancam” dan perkiraan atas kemampuan Iran sendiri yang tidak merasa “lebih kuat”; yang menjadikannya “konfrontatif” dan juga tidak merasa “lebih lemah”; yang menjadikannya “akomodatif”.

Upaya Diplomasi Konferensi

Pada intinya, tidak ada yang berubah dalam substansi politik luar negeri Iran. Motif politik luar negeri Rowhani justru mundur ke kebijakan yang sama dari pendahulunya, Ahmadinejad, serta tetap patuh terhadap perintah Khamenei. Yang membedakan hanyalah, Rowhani menyampaikan kebijakannya itu kepada lawan diplomasinya melalui bahasa yang ringan dan dengan intonasi nada yang ringan pula.

Langkah-langkah diplomatik yang dilakukan Iran di era presiden Hasan Rohani untuk mempertahankan program nuklirnya antara lain dengan melakukan *negosiasi* yang dilaksanakan oleh perwakilan negara Kelompok 5+1. Iran melakukan perundingan dengan mengajukan bukti-bukti yang ada bahwa program pengayaan uranium Iran sepenuhnya bertujuan kemanusiaan dan perdamaian.

Dalam diplomasi terdapat konsep *conference diplomacy* yaitu perundingan diplomatik multilateral dalam skala luas yang dilakukan melalui pertemuan internasional. Konferensi diplomasi ini bersifat “terbuka”, berbeda dengan diplomasi “rahasia”. Teknik konferensi diplomasi dapat mendorong pemecahan masalah manakala kepentingan nasional tidak dapat diselesaikan oleh forum pembicaraan dan perundingan yang telah disediakan.

Upaya *multilateral diplomacy* dilakukan di era Presiden Iran Hasan Rohani yang lebih moderat. Dalam upaya untuk mempertahankan program nuklirnya ditengah penentangan dunia Barat, Iran melalui upaya diplomasi atau jalur resmi berusaha mencapai kepentingan nasionalnya dengan

mematuhi peraturan-peraturan internasional yang resmi dan sah. Pemerintah dan rakyat Iran tak pernah mundur dalam mempertahankan haknya di bidang nuklir sipil sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional, Piagam Badan Energi Atom Internasional (IAEA), serta prinsip kedaulatan nasional Iran sendiri. Diplomasi terbuka dan resmi yang dilakukan oleh Iran menjadikan pelindung legalitas pengembangan program nuklir di negaranya.

Pada tanggal 23 November 2013, Presiden Obama menyebut kesepakatan nuklir dengan Iran sebagai hal yang bersejarah. Kesepakatan nuklir ini adalah kesepakatan pertama kalinya dibuat sejak negosiasi yang dimulai pada tahun 2003. Obama mengatakan, “Singkatnya, mereka menghapus kemungkinan Iran untuk membuat bom nuklir.” Sementara itu, Iran merayakan kesepakatan ini. Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan, “Atas karunia Allah dan dukungan bangsa Iran merupakan alasan di balik keberhasilan ini,” Sementara Hassan Rouhani, Presiden Iran, menyimpulkan hal itu sebagai kesepakatan yang sangat positif. “Kesepakatan ini menguntungkan semua negara regional dan perdamaian global,”

PENUTUP

Walaupun mendapat banyak tekanan dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya agar menghentikan program nuklirnya, Iran tetap mampu mempertahankan pendiriannya untuk meneruskan aktifitas pengayaan uranium di negaranya. Tekanan-tekanan tersebut disampaikan secara langsung sebagai ancaman, maupun upaya Amerika Serikat untuk memanfaatkan IAEA ataupun DK PBB agar memberatkan posisi Iran.

Untuk menganalisa bagaimana Iran mampu mempertahankan program nuklirnya, digunakan Tipologi Strategi Politik Luar Negeri dan Konsep Diplomasi. Dari kedua kerangka dasar pemikiran tersebut didapatkan penjelasan bahwa keberhasilan Iran untuk mempertahankan program nuklirnya dipengaruhi oleh strategi penilaian atas kebijakan luar negeri AS yang dianggap cenderung “mengancam” dan penilaian atas kemampuan Iran

sendiri yang tidak merasa “lebih lemah” atau “lebih kuat”; yang kemudian menghasilkan kebijakan “defensif”.

Penilaian atas kemampuan Iran sendiri tersebut menjadikan Iran percaya diri untuk melawan tekanan-tekanan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. “Kekuatan-kekuatan” yang dimiliki Iran tersebut antara lain kekuatan “legitimasi” dari IAEA, penilaian “fundamental ekonomi yang kuat”, “kemandirian teknologi”, dan “kesatuan sikap” rakyat Iran yang mendukung sikap oposisi terhadap kebijakan-kebijakan imperialistik Amerika Serikat dan Barat.

Iran memiliki “kekuatan” yang bersifat “legal” yaitu dasar hukum perjanjian dengan IAEA dan traktat NPT. Sesuai pasal keempat Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Iran berhak mendayagunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Dalam rangka transparansi dan menggalang kepercayaan internasional, Iran juga menandatangani Protokol Tambahan IAEA sebagai wujud kepatuhan Iran terhadap semua aturan dan persyaratan IAEA. Hal ini kemudian terbukti dengan dikeluarkannya laporan IAEA pada tanggal 2 September 2005 yang menyatakan bahwa ‘semua bahan-bahan nuklir yang ditunjukkan oleh Iran telah diteliti dan tidak ditemukan indikasi adanya usaha membelokan eksperimentasi nuklirnya untuk tujuan-tujuan yang terlarang.

Iran juga memiliki perkiraan “kekuatan ekonomi” dalam konsekuensinya sebagai negara yang mendapat sanksi ekonomi dikarenakan permasalahan pengadaan teknologi nuklir. Sanksi ekonomi yang dikenakan oleh DK PBB tidak akan efektif mempengaruhi kinerja ekonomi Iran. Fundamental ekonomi Iran sangat bagus bila dibandingkan dengan 58 negara Organisasi Konferensi Islam (OKI). Gerakan Iran untuk 'menjauhi' dolar juga menjadi daya tawar tersendiri dalam konflik nuklir Iran.

Iran juga memiliki kekuatan “kemandirian” pengembangan teknologi nuklir. Selain mendapat dukungan Rusia dalam pembangunan instalasi nuklir di Bushehr, Iran juga telah menguasai teknologi eksplorasi tambang uranium dan mengkonversikan uranium menjadi “adonan kuning” (*yellow cake*) atau konsentrat uranium. Iran juga telah mampu memperkaya uranium melalui

sistem laser tanpa bergantung kepada “niat baik” negara-negara penentang nuklir Iran.

“Kekuatan” lain yang dimiliki Iran adalah “kesatuan sikap” masyarakat Iran yang anti imperialisme Barat, khususnya Amerika Serikat. Dasar pemerintahan teo-demokrasi yang diterapkan Iran serta pengalaman Revolusi Islam Iran tahun 1979 menjadikan masyarakat Iran memiliki karakter yang keras dan opositif terhadap kebijakan-kebijakan hegemoni dan intervensi Barat.

Selain itu Iran juga menggunakan diplomasi konferensi sebagai sarana untuk membuktikan kepada AS dan seluruh dunia bahwa program nuklir Iran semata-mata bertujuan damai. Upaya *multilateral diplomacy* dilakukan di era Presiden Iran Hasan Rohani yang lebih moderat. Dalam upaya untuk mempertahankan program nuklirnya ditengah penentangan dunia Barat, Iran melalui upaya diplomasi atau jalur resmi berusaha mencapai kepentingan nasionalnya dengan mematuhi peraturan-peraturan internasional yang resmi dan sah. Pemerintah dan rakyat Iran tak pernah mundur dalam mempertahankan haknya di bidang nuklir sipil sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional, Piagam Badan Energi Atom Internasional (IAEA), serta prinsip kedaulatan nasional Iran sendiri. Diplomasi terbuka dan resmi yang dilakukan oleh Iran menjadikan pelindung legalitas pengembangan program nuklir di negaranya.

Republik Islam Iran pada tahun 2014 mengambil langkah-langkah signifikan untuk membangun kepercayaan dan mengakhiri propaganda panjang Barat terhadap program nuklir damai. Kesepakatan Iran dan Kelompok 5+1 di Jenewa merupakan buah pertama dari diplomasi tersebut. Di awal-awal tahun 2014, Iran dan Barat akhirnya mengumumkan kesepakatan final untuk melaksanakan butir-butir perjanjian Jenewa setelah menyelenggarakan pertemuan intens pada tingkat ahli.

Diplomasi melalui *Summit diplomacy*, yaitu diplomasi pribadi yang dilakukan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan yaitu pembicaraan

melalui telepon antara Hasan Rowhani dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Pembicaraan bersejarah melalui telepon. Ini adalah pembicaraan pertama di antara kedua pemimpin negara sejak revolusi Islam 1979. Dalam percakapan telepon itu, Obama mengatakan dia dan Rowhani menyadari tantangan yang membentang di hadapan kedua negara dan akan terus membahasnya sampai tercapai kesepakatan atas program nuklir Iran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagir, Haidar, *Republik Islam Iran: Revolusi Menuju Teodemokrasi*, Dalam *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
- Basri, Syafiq, *Iran Pasca Revolusi, Sebuah Reportase Perjalanan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- Engineer, Asghar Ali, *Devolusi Negara Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Harold Nicholson, "Diplomacy", London: 1942, dalam S.L. Roy, *Diplomasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Ivo D. Duchacek, "Conflict and Cooperation Among Nations", New York, 1961, dalam S.L. Roy, *Diplomasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Bandung: CV Abardin, 1990
- Jones, Walter S., *Logika Hubungan Internasional 2*, Jakarta: PT. Gramedia, 1993
- K.M. Panikkar, "The Principles and Practice of Diplomacy", Bombay, 1957, dalam S.L. Roy, *Diplomasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995., hal. 3
- K.M. Panikkar, "The Principles and Practice of Diplomacy", Bombay, 1957, dalam S.L. Roy, *Diplomasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

B. Majalah, Website dan Surat Kabar

- Asrudin: Menyingkap Motif Politik Luar Negeri Presiden Iran, dalam <http://jaringnews.com> diakses 19 Februari 2015.
- Abdul Choliq Wijaya, "Iran Siap Menghadapi Serangan Amerika Serikat Kamis", *Pikiran Rakyat*, diakses 3 Februari 2015
- Abdul Choliq Wijaya, "Iran Siap Menghadapi Serangan Amerika Serikat Kamis", *Pikiran Rakyat*, 18 Februari 2015

Elaine Sciolino, "Iran seeks talks but rejects nuclear Freeze," New York Times, 12 June 2006; Gareth Smyth, "Iran sees 'problems' in offer to lure it off the nuclear path," Financial Times, 12 June 2006. Dalam *Ibid*.

<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infocircs/Numbers/nr201-250.shtml>, diakses 28 November 2014.

<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infocircs/Numbers/nr201-250.shtml>

IAEA Reports. Dalam http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/iaea_reports.shtml. Diakses pada tanggal 15 Maret 2014. IAEA. 2014.

IAEA. 2004. *Chronology of Key Events (September 2002-November 2004)*. Dalam [http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/iran_timeline.shtml#september 02](http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/iran_timeline.shtml#september%2002). Diakses pada tanggal 15 Maret 2014. IAEA. 2014.

IAEA: Iran Cooperating in Nuclear Investigation," The Washington Post, 31 August 2007.

Jay Solomon dan Farnaz Fassih "AS, Eropa Tekan Presiden Baru Iran" dalam <http://indo.wjs.com>, diakses 18 Januari 2015. jam 20.34 WIB.

Kaleidoskop Iran Tahun 2014 (Bagian 1)" dalam <http://www.indonesian.tribune.com>. Diakses 18 Februari 2015.

Kesepakatan Nuklir Iran-Amerika, Siapa Pemenang Sesungguhnya ? dalam <http://www.islampos.com>, diakses 21 Februari 2015.

M Luthfi Hamidi, "Taktik Pukul Balik Iran", *Republika*, 19 Februari 2015

Rusydi Hikmawan, "Penegakan Hak Nuklir Damai Iran ", diakses pada tanggal 14 Februari 2015, tersedia dalam <http://Pencerahanglobal.blogspot.com>

Toni Eriyanto. 2014. *Memahami Sikap Indonesia Dalam Soal Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1747 Tentang Nuklir Iran*. Dalam <http://www.wikimu.com/News/Print.aspx?id=2604>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2014.

U.S. Seeks Support for Sanctioning Iran: Nuclear Issues Unresolved, IAEA Says," The Washington Post, 23 February 2008; "Iran fails to answer weapons questions - UN body," The New Zealand Herald, 23 February 2008.